

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rencana, keputusan, dan lain-lain. Eksekusi adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci, dan penerapan setelah perencanaan dianggap matang. Menurut G.R Terry (Sukarna 2010: 3), eksekusi adalah kegiatan yang melibatkan penentuan tujuan, pengelompokan, pencapaiannya, dan penugasan orang-orang tertentu sesuai dengan mandat yang kaya yang diberikan kepada mereka untuk melaksanakannya. Majone dan Wildasky (Nurdin Usman 2002:70) berpendapat bahwa implementasi adalah evaluasi. Ini menyatakan kembali bahwa implementasi adalah perpanjangan dari semua kegiatan yang saling berkoordinasi.¹

Adapun pengertian menurut para ahli lainnya yaitu: Menurut Westra (2011: 24), implementasi adalah upaya melengkapi semua persyaratan dan alat yang diperlukan, serta melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan kemudian oleh siapa yang akan melaksanakannya, kapan dan di mana. mereka akan dilaksanakan. Menurut Tjokroadmudjoyo, pengertian eksekusi adalah keseluruhan proses memotivasi bawahan untuk bekerja menurut cara yang benar-benar mereka inginkan, guna mencapai organisasi yang efisien dan ekonomis.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar, konsep implementasi adalah pengambilan keputusan dari suatu kebijakan dasar, biasanya berupa undang-undang, tetapi dapat juga berupa perintah atau keputusan yang disepakati. Keputusan biasanya dikatakan untuk mengidentifikasi masalah yang harus ditangani dan secara eksplisit menyatakan tujuan yang ingin dicapai atau cara yang berbeda untuk menyusun proses implementasi. Proses ini dimulai dengan pengesahan sebuah undang-undang dan melewati langkah-langkah khusus yang mengarah pada penerapannya oleh kelompok sasaran. Hasil akhir dari

¹ Hafidhuddin Didin dkk, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2008), https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_syariah_dalam_praktik/PRFfhYdzya_wC?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+pelaksanaan+menurut+kbbi&printsec=frontcover

implementasi ini berdampak pada dikendakinya atau tidak dari hasil pelaksanaan akan terjadi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan.

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Rahardjo Adisasmita 2011: 24), pemenuhan adalah seluruh proses memotivasi individu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan akhir mencapai tujuan yang efisien dan ekonomis. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Rahardjo Adisasmita 2011: 24), pemenuhan adalah seluruh proses memotivasi individu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan akhir mencapai tujuan yang efisien dan ekonomis. Prestasi akan terwujud begitu program kerja yang “berorientasi prestasi” dirumuskan dan dilaksanakan. Siagian juga mengatakan ada peringatan untuk implementasinya.

- a. Pembuatan rencana yang detail, artinya pembuatan rencana strategi (jangka panjang) menjadi rencana teknis (jangka pendek) serta memastikan sumber-sumber dan selanjutnya membuat prosedur tertentu.
- b. Pemberian tugas, artinya perubahan rencana teknis dan rencana praktis yang kemudian melakukan pembagian tugas serta sumber-sumbernya.
- c. Monitor, artinya pelaksanaan dan progres dari pelaksanaan tidak dikaitkan dengan rencana praktis. Proses monitor berarti melakukan pengecekan hasil-hasil yang sudah dicapai.
- d. Review yaitu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, menganalisis pelaksanaan tugas, memeriksa kembali semua pelaksanaan yang sedang berjalan dengan harapan ada perbaikan.²

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan suatu program. Maka dalam sebuah pelaksanaan yang dilakukan, kegiatannya memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a. Keputusan yang jelas tentang siapa yang akan dilimpahkan wewenang untuk mengkoordinasikan program-program yang akan dilaksanakan di sektor tersebut.

² Adisasmita Rahardjo, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_pendapatan_anggaran_daerah/tivjZwEACAAJ?hl=id

- b. Penyusunan program implementasi harus jelas. Prinsip fungsi dasar harus mengikuti prosedur yang diikuti oleh semua pihak dalam hal pencapaian implementasi.
- c. Membangun hubungan kerja yang lebih baik. Komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program harus menjalin kemitraan dan memiliki tanggung jawab serta koordinasi yang jelas.
- d. Mengkoordinasikan persiapan anggaran dan proses pendanaan.

2. Kebijakan publik

Menurut Davis Easton, konsep kebijakan publik adalah penugasan nilai-nilai yang sah atau wajib kepada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan publik dirumuskan untuk menetapkan nilai-nilai otoritatif kepada semua yang terlibat. Namun dalam kebijakan publik ini hanya pemerintahlah yang membuatnya dan melakukan tindakan kepada masyarakat³

Menurut Thomas R. Dye (1978), "Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau dipilih untuk tidak dilakukan" (Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Pengertian ini termasuk pengertian yang ringkas atau tidak rumit, namun dri pengertian tersebut ditelaah oleh beberapa ahli karena dianggapnya menarik perhatian. Menurut Thomas R. Dye itu sendiri, dalam pengertian yang terkandung dalam kebijakan pemerintah itu merupakan sesuatu yang telah dipilih pemerintah maupun tidak, memiliki dampaknya terhadap masyarakat.⁴

Menurut James E. Anderson (1979), "Sebuah tindakan yang bertujuan diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor adalah untuk mengatasi masalah atau keprihatinan." Serangkaian tindakan yang dimaksudkan dan dilakukan oleh seorang aktor. Atau beberapa aktor yang terkait dengan isu tertentu. Definisi yang diberikan oleh James memiliki lima arti:⁵

³ Silitonga Dikson, Evaluasi Implementasi Kebjakan Publik (Banyumas: Zahira Media Publisher, 2022)
https://www.google.co.id/books/edition/Evaluasi_Implementasi_Kebijakan_Publik/bolvEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+publik+david+easton&pg=PA24&printsec=frontcover

⁴ Nugroho Riant, Kebijakan Publik (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021)
https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Publik_Analisis_Kebijakan_Kont/dW8qEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0

⁵ Dunn N. William, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000)

- a. Setiap kebijakan harus memiliki tujuan yang ingin dicapai.
- b. Kebijakan yang dibuat terdiri dari unsur-unsur perilaku dan pola perilaku aparatur pemerintah.
- c. Kebijakan dibuat bukan serta merta ingin dibuat, namun kebijakan dibuat karena hendak dilakukan pemerintah karena berdasarkan suatu hal.
- d. Kebijakan dapat berupa saran atau larangan.
- e. Karena kebijakan publik bersifat otoritatif, ia dibuat oleh undang-undang.

Dalam implikasi yang dikemukakan, memberikan arti bahwa setiap kebijakan yang dibuat memiliki tujuan tertentu dan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam kebijakan publik juga harus jelas aktor-aktor mana saja yang terlibat. Tujuan penetapan atau penetapan kebijakan publik adalah untuk:

- a. untuk menciptakan tatanan sosial
- b. untuk melindungi hak-hak rakyat
- c. Menciptakan unsur ketenteraman dan ketenteraman dalam masyarakat
- d. Kami mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut William J (1978) "*public Policy as a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within the power of those actors to achieve*" (Kebijakan Publik adalah serangkaian pembuatan keputusan didasari dengan tujuan yang akan dicapai dan cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu oleh beberapa aktor politik atau pemerintah dan berada dibawah naungan kekuasaannya). Dalam definisi tersebut dimaknasi bahwa kebijakan publik itu berisi beberapa keputusan dan didukung dengan tujuan serta bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, dan kebijakan publik dibuat karena merespons masalah yang terjadi pada suatu situasi tertentu. Pengertian ini menegaskan bahwa perumusan dari kebijakan ini didasarkan oleh respon kepada masalah sosial yang sedang terjadi, namun tidak semua masalah sosial dibuatkan kebijakan publik. Permasalahan sosial yang memiliki tingkat urgensinya tinggi dan menyentuh kepentingan banyak orang yang menjadikan aktor politik memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan publik sesegera mungkin.

Charles L. Cochran & Eloise F. Malone (1995) *“Public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals..... public policy consist of a plan of action or program and statement of objectives, in other words, a map and a destinatio”* (Kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-program untuk mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan publik terdiri dari rencana aksi atau program dan berupa pernyataan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pedoman dan tujuan).⁶

Larry N. Gerston (2002) Kebijakan publik merupakan gabungan dari beberapa keputusan, komitmen, dan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh mereka yang memegang kekuasaan dalam pemerintahan atau mereka yang terlibat dalam pemerintahan. Hal ini memberikan makna bahwa, pembuat keputusan juga harus memiliki komitmen yang akan dijalankan dalam pembuatan kebijakannya. Menurut Phillip Mooper, *et al.* (1998) kebijakan merupakan jawaban atas masalah, dengan maksud setiap kebijakan yang dibuat karena suatu kondisi tertentu tentunya bertujuan untuk memecahkan masalah.⁷

Menurut Nugroho, kebijakan adalah aturan-aturan yang mengatur suatu kelompok dan harus diikuti dan ditegakkan secara mengikat. Kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut⁸ :

- a. Kebijakan publik adalah arah pelaksanaan tindakan kelompok pemerintah.
- b. Aktor kebijakan publik dilakukan oleh aktor politik.
- c. Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.
- d. Hubungan konkret suatu negara dan pemerintah berbentuk dalam kebijakan publik
- e. Intruksi dari pemerintah berbentuk dalam kebijakan publik.

⁶ Prasetyia Ferry dkk, Analisis Kebijakan Publik Pendekatan Ekonomi dan Studi Kasus (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2021) https://www.google.co.id/books/edition/Analisis_Kebijakan_Publik/rVdmEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+publik+charles+l+cochran&pg=PA5&printsec=frontcover

⁷ Wadji Farid dkk, Hukum dan Kebijakan Publik (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022) https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_dan_Kebijakan_Publik/Ca1sEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kebijakan+publik+larry+n+gerston&pg=PA209&printsec=frontcover

⁸ Sore B.Uddin, Kebijakan Publik (Makassar: CV Sah Media, 2017) https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_Publik/N1RtDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+kebijakan+publik+menurut+nugroho&printsec=frontcover

Menurut Harbani Pasolong mengatakan bahwa kegiatan yang bersifat politis dilakukan melalui serangkaian intelektual. Aktivitas politis dimulai dari beberapa tahap yaitu:

- a. Penyusunan agenda
Oleh aktor pemerintahan yang diberi wewenang membuat kebijakan publik, memilah beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul untuk diolah mana yang didahulukan untuk diproses menjadi agenda kebijakan dan yang akhirnya dirumuskan menjadi sebuah kebijakan.
- b. Formulasi Kebijakan
Isu-isu dalam agenda kebijakan ditangani dan didiskusikan oleh pembuat kebijakan. Dari permasalahan-permasalahan yang muncul akan dicari pemecahan masalah yang terbaik dari semua kebijakan yang ada.
- c. Adopsi kebijakan
Perumus kebijakan memilah beberapa alternatif kebijakan yang ada dan pada akhirnya, kebijakan diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan yudisial.
- d. Implementasi kebijakan
Keputusan kebijakan yang dipilih harus dilaksanakan atau dilakukan oleh departemen.
- e. Evaluasi kebijakan
Pada fase ini, kebijakan yang dipilih telah diimplementasikan dan kebijakan yang dibuat direview dan dievaluasi dengan tujuan untuk melihat sejauh mana menjawab permasalahan yang ada.

Unsur pokok dalam Kebijakan Publik menurut Hogerweft adalah:

- a. Unsur usaha dengan maksud kebijakan itu terjadi sebagai bentuk usaha yang dilakukan, usaha tersebut berbentuk sebuah tindakan atau dalam bentuk pemikiran.
- b. Unsur Tujuan, maksudnya kebijakan yang sudah dibuat dapat dibedakan dengan kebijakan yang lain dikarenakan penegasan kehendak yang dinyatakan atas dasar pengaturan yang nantinya akan membedakan dengan yang lain.
- c. Unsur sarana, ada beberapa yang menjadi pertimbangan dari segi besar atau luasnya sarana dibanding dengan tujuan yang dicapai.
- d. Unsur waktu yang dimaksud adalah seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian kebijakan yang telah dibuat didukung oleh unsur sarana dan kagiatan yang dilakukan.

Dari beberapa pengertian mengenai kebijakan publik yang sudah diuraikan beberapa ahli menyimpulkan bahwa:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh aktor politik atau pemerintah, yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Kebijakan publik mencakup apa yang baik dan apa yang tidak, serta memiliki tujuan tertentu.
- c. Kebijakan publik dibuat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

3. Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan miskin atau keadaan miskin dimana keadaan suatu penduduk hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan taraf hidup minimum. Kemiskinan sendiri merupakan suatu taraf hidup yang rendah atau ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi taraf hidup yang ada dalam suatu masyarakat. Kebutuhan ditandai dengan tidak mampunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan selain kebutuhan pokok mereka. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup mereka dalam segi kesehatan, pendidikan dan hal yang lainnya.

Kemiskinan adalah kondisi orang-orang dimana tidak dapatnya memenuhi hak-hak dasarnya dalam kondisi sosial ekonomi untuk mempertahankan serta mengembangkan hidupnya yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang disebutkan di sini untuk pemenuhan hak individu atau kolektif meliputi pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, air bersih, sumber daya alam, kebutuhan lingkungan, rasa aman dari segala tindakan kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial. dan kehidupan politik.

Syani Abdul mengatakan bahwa kemiskinan pada dasarnya permasalahan yang muncul pada negara berkembang. Permasalahan utama yang menurutnya menjadi permasalahan yang menuntut dengan adanya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi serta menyeluruh dengan waktu yang singkat. Upaya ini dilakukan guna mendukung percepatan proses dari pembangunan negara yang sedang dilakukan dinegara tersebut. Kondisi dimana seseorang tidak dapat memanfaatkan tenaga kehidupan maupun tidak dapat memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan merupakan kondisi dari kemiskinan. Kesadaran seseorang bahwa mereka gagal dalam memperoleh dari apa yang didapatkan ataupun merasa bahwa

tidak adanya ketidakadilan membuat seseorang membenci kemiskinan. Permasalahan kemiskinan pada dasarnya dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan0kebutuhan primer mereka yang mengakibatkan timbul tuna kaya, tuna susila dan lainnya. Jika dilihat secara sosiologis permasalahan tersebut juga disebabkan oleh suatu lembaga yang tidak berfungsi dengan semestinya., pendapat ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.⁹

Supriatna (1997:90) mengatakan bahwa kemiskinan adalah keadaan terbatas yang tidak timbul karena kehendak orang yang bersangkutan. Seseorang dikatakan miskin diidentifikasi dengan tingkat rendahnya pendidikan, kesehatan, produktifitas kerja, pendapatan dan kesejahteraan menunjukkan tingkat tak berdaya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya keterbatasan sumber daya manusia baik pada pendidikan formal maupun informal yang menyebabkan rendahnya pendidikan informal.¹⁰

Dimensi kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan menentukan sumber daya alam yang tersedia bagi suatu kelompok dan membandingkannya dengan ukuran standar. Kemiskinan dalam pengertian ini berkaitan dengan pendapatan dan kebutuhan, dimana kebutuhan tersebut merupakan basic needs atau kebutuhan dasar minimal untuk kecukupan hidup. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan menimbulkan kecemasan karena kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kesengsaraan disetiap langkah hidupnya. Arti dari kehidupan pokok disini merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki guna dapat hidup secara manusiawi, diantara lain kebutuhan kesehatan serta gizi yang baik untuk segala tingkat macam usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim serta kebutuhan sandang pangan dan papan. Aspek penting dari dimensi kemiskinan meliputi:

- a. Kurangnya akses pribadi ke aspek politik, yaitu proses pengambilan keputusan di mana keputusan terkait dengan kehidupannya sendiri.

⁹ Sriyana, Sosiologi Pedesaan (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022) https://www.google.co.id/books/edition/SOSIOLOGI_PEDESAAN/mXZjEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kemiskinan+menurut+syani+abdul&pg=PA356&printsec=frontcover

¹⁰ Rahayu Sri dkk, Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah (Malang: Ahlimedia Press, 2022) https://www.google.co.id/books/edition/MODEL_PEMBERDAYAAN_EKONOMI_MAS_YARAKAT_LO/qteXEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kemiskinan+menurut+supriatna&pg=PA243&printsec=frontcover

- b. Aspek sosial, yaitu eksklusi dari institusi utama masyarakat yang ada.
- c. Aspek ekonomi yaitu rendahnya tingkat sumber daya manusia, kesehatan, keterampilan, pendidikan akan berdampak pada rendahnya kepemilikan dan rendahnya pendapatan aset yang dimiliki seperti air bersih dan penerangan.
- d. Dari segi budaya/nilai yaitu kebiasaan masyarakat, kualitas sumber daya manusia rendah, tingkat pendidikan rendah, etos kerja lemah, dan mereka memiliki sikap menyerah tanpa memikirkan jangka panjang. dengan mudah.

Kemiskinan merupakan masalah terpenting di Indonesia yang perlu segera diatasi, penyebab utama kemiskinan itu sendiri karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang tidak menguntungkan kelompok miskin yang mengakibatkan akses yang memadai sulit dijangkau oleh kelompok miskin. Penyebab kemiskinan menurut Chambers yaitu:

- a. Kemiskinan absolut, kemiskinan ini disebabkan pendapatan yang didapat berada dibawah garis kemiskinan yang menjadikan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar mereka untuk dapat hidup dan bekerja
- b. Kemiskinan kultural, kemiskinan ini disebabkan oleh faktor budaya dari sekelompok masyarakat tersebut. Sikap yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat tersebut akan berimbas pada kemiskinan yang mereka tanggung seperti kebiasaan tidak mau berusaha, malas dan tidak memiliki kekreatifan untuk menjalani dan mengolah sumber daya alam yang ada.
- c. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini disebabkan oleh garis suatu sistem sosial budaya politik yang dimana didalamnya memiliki tingkat kerendahan akses terhadap sumber daya yang menjadikan suburnya kemiskinan.
- d. Kemiskinan relatif, keadaan kemiskinan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang dijalankan tidak bisa menjangkau semua elemen masyarakat yang ada dan mengakibatkan ketimpangan pendapatan dan masyarakat tersebut berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

Menurut Edi Suharto konsep kemiskinan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu¹¹ :

- a. Kemiskinan absolut, konsep kemiskinan, terutama terkait dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan masyarakat, yang kebutuhannya dibatasi oleh kebutuhan dasarnya atau kebutuhan dasar untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Ketika kebutuhan minimum masyarakat tidak dapat dijangkau dengan pendapatan mereka, maka masyarakat tersebut dikatakan miskin. Dengan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan masyarakat jika tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan mereka maka dapat dikategorikan kedalam golongan miskin. Pembatas keadaan masyarakat miskin atau tidak miskin dapat dilihat dari tingkat pendapatan minimumnya. Konsep ini dapat menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik sandang, pangan dan papan untuk menjamin kelangsungan hidup.
- b. Kemiskinan relatif, yaitu kategori yang membandingkan keadaan kemiskinan yang dialami individu atau kelompok dengan keadaan masyarakat.
- c. Konsep kemiskinan budaya dan kemiskinan mengarah pada sikap individu, gaya hidup, nilai, dan orientasi sosial budaya di era kemajuan masyarakat modern.
- d. Kemiskinan struktural, kemiskinan ini disebabkan oleh ketidakadilan struktural politik, sosial dan ekonomi yang menghalangi beberapa kelompok untuk mencapai sumber daya yang tersedia.

Agar manusia dapat hidup layak dan manusiawi, kebutuhan dasarnya berkaitan dengan komposisi makanan bergizi, kebutuhan air bersih, tingkat kesehatan, pendidikan dan perumahan. Garis kemiskinan ditentukan oleh batas pendapatan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang kebutuhan dasar yang diperlukan, posisi sosial mereka di antara komunitas lain di sekitarnya, dan kebutuhan obyektif orang biasa untuk hidup secara manusiawi.

¹¹ Ginting Bengkel, Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percut (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022) https://www.google.co.id/books/edition/Pemberdayaan_Nelayan_Tradisional_Analisi/sat2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=konsep+kemiskinan+menurut+edi+suharto&pg=PA39&printsec=frontcover

Ada lima karakteristik penduduk miskin menurut Emil Salim adalah tidak memiliki faktor produksi sendiri, tidak memiliki peluang untuk memiliki aset sendiri dengan kuasanya sendiri, tingkat pendidikannya rendah, tidak memiliki fasilitas, dan yang terakhir memiliki usia muda namun tidak memiliki ketrampilan tersendiri pendidikan yang memadai.¹²

Menurut Emil Salim untuk memperbaiki nasib manusia harus diikutsertakan campur tangan dan bantuan pemerintah untuk keluar dari garis kemiskinan, karena menurutnya campur tangan dari pemerintah masyarakat miskin akan lebih mampu merebut bagian yang lebih layak dari pendapatan nasional.

Adapun untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi

¹² Burian Zaenal Effendi, Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Budaya Dasar dan Ilmu Sosial Dasar (Malang: Intelegensia Media, 2020) https://www.google.co.id/books/edition/Ilmu_Alamiah_Dasar_Ilmu_Budaya_Dasar_dan/tYjxDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=karakteristik+kemiskinan+menurut+emil+salim&pg=PA132&printsec=frontcover

kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.¹³

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- a. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference population*) yaitu 20% penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasarkan GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini, kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- b. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi, yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{\Omega} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{\Omega} V_{jkp}$$

Dimana :

GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi

p .

P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .

Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .

V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .

j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p : Provinsi ke- p .

¹³ “Badan Pusat Statistik” diakses pada 7 July, 2023.
<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{\Omega} Y_{jkp}}{\sum_{k=1}^{\Omega} K_{jkp}}$$

Dimana :

K_{jkp} : Kalori dari komoditi k di daerah j di provinsi p

\overline{HK}_{jp} : Harga rata-rata kalori di daerah j di provinsi p

- c. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993, komoditi non-makanan terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di perdesaan. Kemudian sejak tahun 1998, terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di perdesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas Modul Konsumsi. Rasio tersebut dihitung berdasarkan hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau perdesaan)

p : Provinsi ke- p

Presentase Penduduk Miskin

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 0$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.¹⁴

1) Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

¹⁴ “ Badan Statistik Pusat” diakses pada 7 juli, 2023. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2) **Indeks Keparahan Kemiskinan**

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

3) **Gini Ratio**

Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. *Gini ratio* adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai *gini ratio* berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai *gini ratio* yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

4) **Ukuran Bank Dunia**

Ukuran Bank Dunia adalah salah satu ukuran ketimpangan yang mengacu pada persentase pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah. Adapun kriteria tingkat ketimpangan berdasarkan Ukuran Bank Dunia adalah sebagai berikut :

- a) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan tinggi.
- b) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan moderat/sedang/menengah.
- c) Bila persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan rendah.

e. Pandangan Islam mengenai Kemiskinan

Dalam islam juga membahas mengenai beberapa sudut pandang mengenai kemiskinan. Ada beberapa pandangan yaitu, menurut Al-Ghazali, yang mendefinisikan Islam adalah ketidakmampuan seseorang baik kebutuhan material maupun spiritual. Dalam Islam menganggap sesuatu yang berpotensi membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga serta masyarakat. Dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa keadaan kemiskinan juga harus diperhatikan, terkandung dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Ma'un (107:1-7):

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِاللَّيْنِ (١) فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ (٢) وَلَا يُخْضُ
 عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (٣) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
 سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)

Artinya: “(1) Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. (2) Itulah orang yang menghardik anak yatim. (3) Dan tidak memberi makan orang miskin. (4) Maka celakalah bagi orang-orang shalat. (5) (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya. (6) Orang-orang yang berbuat riya. (7) Dan enggan (menolong dengan) barang berguna.” (Q.S.Al-Ma'un / 107:1-7).¹⁵

Surat Al-Ma'un tersebut menjelaskan bahwa kemiskinan sudah ada sejak lama, dan ayat tersebut memberikan pengertian bahwa kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Menjadi islam itu bukan menjadi manusia individu yang hanya mengerjakan puasa dan solat saja, tidak hanya itu, mereka menjadi manusia sosial yang saling membutuhkan untuk saling membantu.

¹⁵ Alquran, Al Maun 1-7, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001)

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir / 74:42-47):

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِّينَ (٤٣) وَمَنْ نَكُ نُطْعِمُ
 الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِبِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ
 الدِّينِ (٤٦) حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ (٤٧)

Artinya: “(42) Apakah yang memasukkanmu kedalam Saqor (neraka)? (43) Mereka menjawab Kami dahulu termasuk kedalam orang-orang yang tidak mengerjakan shalat. (44) Dan kami tidak (pula) memberi makan orang-orang miskin. (45) Dan adalah kami membicarakan bathil, bersama dengan orang-orang membicarakannya. (46) Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. (47) Hingga datang kepada kami hari kematian”. (Q.S. Al-Muddatsir/ 74:42-47).¹⁶

Ayat tersebut menunjukkan akibat manusia yang masuk kedalam neraka, salah satu ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya kepedulian manusia saat hidup didunia terhadap manusia-manusia yang membutuhkan pertolongan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dahulu sebagai manusia sudah dianjurkan Allah untuk saling peduli dengan kemiskinan atau menaruh peduli terhadap nasib manusia yang kurang beruntung. Perintah ini menempati tempat yang sama pentingnya dengan perintah Allah kepada manusia untuk menjalankan kewajibannya, seperti shalat atau kewajiban beribadah kepada Allah.

Perintah Allah SWT sudah jelas untuk memperhatikan kesenjangan ekonomi sebagaimana telah dijelaskan didalam firman-firman Nya. Dari sudut pandang lain, Allah mengajarkan Anda untuk semangat dan optimis mencari rezeki guna meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketenangan pikiran dalam kondisi sulit dan agar keimanan kepada Allah SWT tetap teguh.

Ketentuan yang berbeda dari orang ke orang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dari segi ekonomi. Namun dalam islam, perbedaan dalam jumlah rezeki yang sudah ditetapkan Allah dapat dialihkan dan diarahkan untuk saling membantu dalam mekanisme zakat. Mekanisme ini secara tidak langsung mengantisipasi kecemburuan sosial tersebut dan

¹⁶ Alquran, Al Muddatsir 42-47, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemahan dan Penerbit Alquran, 2001)

mencukupi kebutuhan pokok dari segi pangan, kesehatan serta pendidikan karena dalam mekanisme zakat itu sendiri dikeluarkan sesuai kemampuan tiap pendapatan perindividu serta diperuntukan oleh golongan-golongan yang sudah ditentukan salah satunya fakir miskin.

f. Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada Sidang Umum PBB ke-70 yang diadakan di New York pada September 2015, Amerika Serikat menjadi titik bersejarah dalam pembangunan global. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 193 kepala negara dan pemerintahan dan menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen judul *Transforming Our World: the 2030 agenda for Sustainable Development* ini mencakup 17 target dan 169 target yang berlaku dari tahun 2016 hingga 2030. Dokumen-dokumen ini dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.¹⁷

Program SDGs merupakan perpanjangan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang disepakati pada tahun 2000 dan berakhir pada tahun 2005. Kedua program berbeda dalam konten dan persiapan. Sasaran MDGs adalah membagi dua setiap masalah pembangunan yang dinyatakan dalam tujuan dan sasaran. Dilakukan lebih dari 15 tahun yang lalu, program MDGs meliputi 8 target, 21 target dan 60 indikator. Angka ini jauh dari program SDGs yang telah disepakati karena program SDGs merupakan kelanjutan dan pelengkap dari program MDGs.¹⁸

Proses MDGs menargetkan negara berkembang dan negara berkembang dengan tanggung jawab yang lebih besar untuk mencapai pembangunan tanpa memberikan peran yang seimbang kepada negara maju. Kelemahan proses MDGs adalah formalisasi yang eksklusif dan sangat birokratis dari persiapan awal hingga implementasi tanpa melibatkan peran pemangku kepentingan di luar pemerintah. Berbeda dengan konsep SDGs yang secara komprehensif menerima isu pembangunan baik

¹⁷ “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs),” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada 15 November, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Rencana_Aksi_SDGs_2030_Indonesia/RbYjEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PP5&printsec=frontcover

¹⁸ Pramujo Bambang dkk, *Mangrove untuk SDGs* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021) https://www.google.co.id/books/edition/Mangrove_Untuk_SDGs/tHtfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PA87&printsec=frontcover

kualitatif maupun kuantitatif dari sudut pandang kualitatif dengan merangkul semua isu pembangunan yang tidak diangkat dalam MDGs. Dari segi kuantitatif memberikan makna dengan menargetkan secara tuntas dalam penyelesaian setiap tujuan dan sasarannya. Peran universal SDGs dikatakan seimbang karena semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, berkontribusi penuh dan berbagi peran dan tanggung jawab dalam proses pembangunan untuk mencapai SDGs. Conference on Sustainable Development merupakan kegiatan yang memunculkan konsep SDGs yang diusung oleh PBB di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Dimensi pembangunan berkelanjutan terdiri dari dimensi lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Dari tiga dimensi utama yang disebutkan, SDGs memiliki lima landasan utama untuk mencapai tujuan pada tahun 2030: Manusia, Planet, Kemakmuran, Perdamaian, dan Kemitraan. Tujuannya adalah untuk mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan memerangi perubahan iklim. Kemiskinan merupakan isu utama yang mendorong program SDGs untuk menyusun 17 Tujuan Global.¹⁹

Goals dari program SDGs yang sudah disusun dan yang menjadi tujuan globalnya yaitu:

- 1) *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan), program ini tidak mengizinkan segala bentuk kemiskinan di dunia.
- 2) *Zero Hunger* (Tanpa Kelaparan), program yang mencapai hasil nol kelaparan dalam mempromosikan ketahanan pangan, peningkatan gizi dan praktik pertanian berkelanjutan.
- 3) *Good Health and Well-Being*, menjamin kehidupan masyarakat yang sehat sehingga kesejahteraan hidup merata pada semua kelompok umur.
- 4) Mewujudkan pemerataan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pendidikan yang memadai dan meningkatkan kesempatan belajar bagi semua.
- 5) Kualitas gender, tidak ada perbedaan gender untuk mengangkat perempuan dalam pemberdayaan.
- 6) Air Bersih dan Sanitasi Air bersih dan sanitasi dijamin untuk semua.

¹⁹ “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs),” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada 15 November, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Rencana_Aksi_SDGs_2030_Indonesia/RbYjEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PP5&printsec=frontcover

- 7) Energi yang terjangkau dan bersih, memastikan akses terhadap sumber energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, tersedianya lapangan kerja produktif dan adanya pekerjaan yang layak (pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak).
- 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur, mengembangkan infrastruktur yang berkualitas untuk mendorong perbaikan industri secara terus menerus yang pada akhirnya mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi Kesenjangan pemerataan agar tidak terjadi kesenjangan dalam suatu negara atau antar negara yang berbeda.
- 11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*Urban and Community Sustainability*), pembangunan perkotaan yang merata di seluruh permukiman melalui pembangunan yang inklusif, berkualitas, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- 12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta kelangsungan pola konsumsi dan produksi terjamin.
- 13) *Climater Action* (Aksi terhadap Iklim), perubahan iklim yang terjadi dan memiliki sebuah dampak akan segera ditanggulangi dengan cepat.
- 14) *Life Below Water* (Kehidupan Bawah Laut), dengan adanya sumber daya laut yang sudah ada akan dilestarikan guna keberlangsungan perkembangan pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi seluruh kehidupan di darat melalui kegiatan melindungi, memulihkan dan meningkatkan kelestarian pemanfaatan ekosistem darat yang ada, termasuk pengelolaan hutan dan segala permudaannya, agar selalu terpelihara dan dimanfaatkan secara lestari. Sumber Daya yang Tersedia Sudah tersedia di darat.
- 16) Perdamaian, keadilan dan terciptanya institusi yang kuat dan masyarakat yang damai akan mendukung pembangunan berkelanjutan, menciptakan akses keadilan bagi institusi, akuntabilitas untuk semua, dan membangun institusi yang akuntabel, inklusif dan efektif. di semua tingkatan.

17) Kemitraan untuk Tujuan, Memperkuat Kemitraan untuk Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dan Menghidupkan Kembali Kemitraan Global²⁰

Tercapainya SDGs dalam negara-negara yang berkontribusi harus diimbangi dengan adanya perdamaian, rasa aman serta saling menghormati hak asasi manusia, hal ini ditegaskan oleh Presiden Majelis Umum PBB. Keberhasilan ini tidak lagi didukung oleh senjata yang lebih besar dan perang yang dapat menghancurkan sumber daya yang dapat digunakan karena menghambat pembangunan berkelanjutan.

Adanya program SDGs sebagai pengganti maupun penyempurna MDGs memiliki kelebihan antara lain:²¹

- 1) Program SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. Pembuatan program SDGs dibuat secara detail melewati negoisasi internasional yang diikuti negara berpendapatan menengah maupun rendah. Jika program MDGs dibuat oleh anggota negara The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
- 2) Peran swasta dalam program SDGs jauh lebih besar.
- 3) Konsep standar MDGs adalah tidak adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak yang masih terjebak dalam kemiskinan. Hal ini kontras dengan konsep SDGs yang sudah lebih mendukung prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
- 4) SDGs adalah program komprehensif. SDGs dibagi menjadi 7 untuk difabel, 6 untuk difabel, 6 untuk keadaan darurat, 7 untuk universalitas, dan 2 untuk non-diskriminasi.
- 5) Program SDGs mencakup indikator yang memberikan peluang keterlibatan masyarakat sipil.
- 6) PBB yang menerapkan SDGs dapat menginspirasi negara-negara di dunia.
- 7) Konsensus global tentang perubahan iklim dicapai pada Konferensi Para Pihak ke-21 (COP21) di Paris, berfungsi sebagai langkah transisi menuju ekonomi dan masyarakat

²⁰ “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs),” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada 15 November, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Rencana_Aksi_SDGs_2030_Indonesia/RbYjEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PP5&printsec=frontcover

²¹ Iskandar A.Halim, SDGs Desa (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,2020) https://www.google.co.id/books/edition/SDGs_DESA_Percepatan_Pencapaian_Tujuan_P/yfoIEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PA101&printsec=frontcover

rendah karbon di mana orang-orang yang tahan iklim dapat berkembang.

SDGs memiliki prinsip yang disebut 5P, yang mencakup 17 tujuan dan 169 target yang saling berhubungan dan terintegrasi untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari *People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership*. Prinsip 5P merupakan prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan.²²

Dengan adanya SDGs, pemerintah serta kepala negara meneguhkan komitmen serta fokus akan tujuan dari SDGs itu sendiri dengan menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, meningkatkan kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan dan mengurangi ketimpangan. Dalam agenda pembangunan ini dilakukan tanpa adanya perbedaan dengan tujuan penyamarataan agar seluruh elemen yang dituju dapat merasakannya.

Agenda pembangunan berkelanjutan ini didukung oleh Sendai Framework Agreement yang disepakati pada Konferensi PBB ke-3 di Hefang, Sendai. Dalam kesepakatan tersebut hal yang telah disepakati soal penanganan kebencanaan hingga tahun 2030. Ada lagi kesepakatan yang disebut AAAA (Addis Ababa Action Agenda). Perjanjian tersebut melibatkan perwakilan dari beberapa negara yang setuju untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan, bagi kepala negara dan pemerintahan untuk mengatasi tantangan keuangan dan membangun kemitraan dan semangat global. usia.²³

Selain Perjanjian ini, terdapat Perjanjian Paris yang merupakan kesepakatan antara beberapa pihak yang tergabung dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah upaya bersama untuk

²² “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs),” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada 15 November, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Rencana_Aksi_SDGs_2030_Indonesia/RbYjEAAAOBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PP5&printsec=frontcover

²³ Mulyanto dkk, *Pembangunan SDGs dalam Pembangunan Bangsa Prospek dan Kendala* (Klaten: Lakeisha, 2022). https://www.google.co.id/books/edition/PENERAPAN_SDGs_DALAM_PEMBANGUNAN_BANGSA/vbZ9EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pembahasan+sdgs&pg=PT123&printsec=frontcover

mengatasi perubahan iklim di satu wilayah negara yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi negara lain.

Majelis Umum PBB ke-70 menghasilkan dokumen hasil SDGs dengan 17 tujuan, 169 target dan beberapa indikator dengan mekanismenya masing-masing. Tujuan penyusunan indikator ini adalah sebagai Tim Tugas Sistem PBB Pasca-2015, memberikan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari agenda implementasi SDGs dan melakukan analisis untuk menghasilkan dokumen yang mencakup tujuan dan sasaran SDGs.

Pelaksanaan SDGs tentu akan melakukan proses tindak lanjut dan pelaporan (Follow-up and Review) untuk mengetahui dan mengukur hasil pembangunan yang dilakukan. Serangkaian indikator disiapkan di tingkat global, regional dan nasional. Sebagai bagian dari upaya mengidentifikasi kerangka kerja indikator global untuk tujuan dan sasaran SDGs, SDGs *Statistics Committee* membentuk *Inter-Agency Group of Experts on SDGs Indicators* (IAEG) pada Maret 2015. Proposal untuk indikator global disiapkan dan didaftar untuk pertimbangan langkah selanjutnya yang akan diajukan ke pertemuan tahunan Komisi Statistik PBB pada Maret 2016. Sebagai persiapan, IAEG mengadakan beberapa pertemuan untuk menghasilkan tepat 242 indikator global dengan berbagai final.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Banyak kajian terkait implementasi program SDGs melalui program keluarga harapan untuk penanggulangan kemiskinan di Dinas Kesejahteraan Sosial:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Bhayu Pratama, Eko Priyo Purnomo dan Agustiyara dengan judul “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.*”

Pada penelitian tersebut, penulis meneliti mengenai pelaksanaan program SDGs yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil kajian ini, Pemerintah Provinsi DIY melaksanakan program SDGs, yaitu program peningkatan akses air minum bersih, program yang dilaksanakan oleh Kementerian

²⁴ “Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs),” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, diakses pada 15 November, 2022. https://www.google.co.id/books/edition/Rencana_Aksi_SDGs_2030_Indonesia/RbYjEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=sdgs&pg=PP5&printsec=frontcover

Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta membangun ketahanan terhadap bencana, dari program tersebut sudah dijalankan dan mampu mengurangi angka kemiskinan secara multidimensional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ricky Rahmatullah, Teguh Endaryanto, M. Irfan Affandi dengan judul *“Pengarusutamaan Sustainable Development Goals (SDGs) Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Pagar Alam”*

Pada penelitian tersebut, penulis menginvestigasi pengentasan kemiskinan di Kota Pagar Alam dengan memprioritaskan program SDGs. Hasil penelitian yang mengkolaborasikan penganggaran program pengentasan kemiskinan terpadu melalui APBN Kota Pagar Alam yang dipadukan dengan APBN menunjukkan pola yang berkorelasi signifikan dengan persentase tingkat kemiskinan. Pilihan program utama dalam kerangka pengentasan kemiskinan dengan mengarusutamakan SDGs dalam pelaksanaannya adalah program pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam model Analytical Hierarchy Process (AHP). Namun, program besar ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi dengan program-program lain yang berkaitan dengan kemiskinan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syapsa, Dahlan Tampubolon, Sri Endang Komita dengan judul *“Kemiskinan Multidimensi dalam Percepatan Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Riau”*

Pada penelitian tersebut, penulis mengkaji identifikasi kemiskinan berdasarkan Multidimensional Poverty Approach (MPA) dengan menggunakan indikator dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai metode terstruktur untuk tujuan SDGs di Riau. Hasil penelitian ini, angka partisipasi murni SMA cenderung berada di bawah angka nasional, angka putus sekolah menunjukkan tren menurun, namun prevalensi gizi buruk justru meningkat. Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat aksi publik cenderung meningkat. Air minum yang layak cenderung menurun dalam analisis perspektif infrastruktur dasar milik masyarakat. Konsumsi pangan berada di bawah rata-rata nasional meskipun trennya meningkat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Handrian, Hendry Andry dengan judul *“Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau”*

Pada penelitian tersebut, penulis meneliti mengenai peninjauan bagaimana pelaksanaan SDGs di Provinsi Riau. Hasil penelitian tersebut yaitu Membuat roadmap percepatan pencapaian SDGs untuk mempercepat pencapaian tujuan SGD. Selain itu roadmap tersebut perlu dijabarkan secara regional dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) SGD sesuai dengan kondisi, permasalahan dan kemampuan Provinsi Riau. Rencana Aksi Daerah ini mengharapkan pihak-pihak terkait dari Negara dan Kabupaten Riau memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai tujuan SGD untuk daerah.

Kita perlu mempercepat untuk memberikan hasil tepat waktu, kita perlu meningkatkan pendanaan untuk meningkatkan kualitas hidup, dan kita perlu inklusi agar semua orang berhasil mencapai SDGs di Riau. Mempercepat pencapaian SDGs melalui RAD SDGs Berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik oleh pemerintah daerah dan kota tentang tantangan yang mereka hadapi dan langkah-langkah yang perlu mereka terapkan untuk mencapai semua SDGs di Riau.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ishartono, Santoso Tri Raharjo dengan judul “*Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*”

Pada penelitian tersebut, penulis meneliti mengenai pelaksanaan program SDGs yang memfokuskan pada pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian tersebut yaitu pekerjaan sosial dianggap memiliki relevansi sangat kuat dengan kemiskinan. Karena program SDGs menempatkan kesejahteraan sosial sebagai garda terdepan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, maka memiliki tujuan yang memerlukan pengawasan bersama baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu telah memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan program SDGs guna pengentasan kemiskinan diberbagai daerah memperlihatkan bahwa tujuannya untuk mensukseskan program SDGs. Pengaplikasian yang dilakukan pada tiap daerah jika dilihat secara garis besar memiliki kesamaan, namun di setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk menjalankan programnya. Secara mendasar tujuan utama dari SDGs memfokuskan pada pengentasan kemiskinan yang nantinya akan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada dengan harapan pembangunan selanjutnya dapat memudahkan pencapaiannya.

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai bahan dasar pengaplikasian oleh pemerintah kepada

masyarakat sebagai wujud pelaksanaan program SDGs yang sedang dijalankan. Sebagai negara yang menyepakati dengan adanya program SDGs, tentunya daerah-daerah juga secara tidak langsung harus ikut berpartisipasi mensukseskan program tersebut. Negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan diikuti oleh ribuan pemerintahan daerah yang tentunya pada setiap daerah memiliki cara tersendiri dalam pelaksanaan program yang dijalankan, melatarbelakangi hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian program SDGs yang dijalankan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Kudus.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan teknik untuk menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel penelitian. Di sini, hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dijelaskan secara wajar dan rinci. Secara umum pola pikir digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk menetapkan arah penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Pola pikir yang baik secara teoritis menggambarkan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Oleh karena itu, perlu dijelaskan secara teoritis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ketika dua atau lebih variabel dapat diterima dalam sebuah penelitian, penelitian tersebut harus meringkaskan pemikiran, dan hipotesis biasanya dirumuskan dalam bentuk perbandingan atau hubungan. Oleh karena itu, untuk mengembangkan hipotesis penelitian dalam bentuk hubungan atau perbandingan, perlu disajikan kerangka berpikir. Ketika seorang peneliti menyusun kerangka kerja untuk menghasilkan hipotesis, dia harus menguasai teori ilmiah yang mendasari argumen tersebut. Kerangka berpikir ini adalah penjelasan sementara dari gejala yang dimaksud.²⁵

Kerangka penelitian ini disajikan secara sistematis sebagai berikut.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 47.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

